



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Jl. Veteran No. 18 KAB. LAMONGAN
JAWA TIMUR

<http://www.pn-lamongan.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 April 2026 s/d 30 Juni 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

3,89 / 97,19 %

JUMLAH **270 RESPONDEN**

GENDER Laki-Laki : **179** org

PENDIDIKAN Tidak/Belum Sekolah : **0** org

SD : 1 org
SMP : 4 org
SMU : 186 org
Diploma 1 : 1 org

PEKERJAAN

PNS : **6** org
TNI : **0** org
Polri : **1** org
Lainnya : **62** org

Perempuan : **91** org
Diploma 2 : **0** org
Diploma 3 : **0** org
Sarjana S1 : **77** org
Magister S2 : **1** org
Doktor S3 : **0** org
Wiraswasta : **162** org
Wirasusaha : **30** org
Tenaga Kontrak : **9** org

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

- | | |
|---|------|
| 1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 3.79 |
| 2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3.83 |
| 3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? | 3.87 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

1. Melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada untuk memperbaiki alur pelayanan agar lebih transparan dan mudah dipahami Masyarakat. Dan mengintruksikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Lamongan khususnya petugas layanan meja PTSP untuk menerapkan nilai integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. 2. Melakukan audit terhadap website pengadilan, khususnya menu informasi biaya perkara dan Memastikan informasi biaya/tarif ditampilkan secara jelas, rinci, dan mudah diakses (tidak tersembunyi atau sulit ditemukan). Serta Menyediakan format informasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum pada ruang PTSP atau Ruang Tunggu sidang Pengadilan Negeri Lamongan. 3. Mengoptimalkan pembayaran melalui bank/virtual account dan Menghindari transaksi langsung antara petugas dan masyarakat. Serta Mengintruksikan pada petugas pelayanan untuk Menginformasikan bahwa seluruh pembayaran hanya sesuai tarif resmi, Dan tidak ada biaya tambahan di luar ketentuan. Sebelum memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

* Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki kualitas pelayanan.



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB



PERIODE :
APRIL S/D JUNI
TAHUN 2026

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB
PERIODE APRIL S/D JUNI 2026**



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014

Disahkan di Lamongan
Pada hari Kamis, 18 Juni 2026
Penanggung Jawab Tim Survey,



Anastasia Irene, S.H., M.H.

Ketua Tim Survey,

Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Sekretaris Tim Survey,

Syihabuddin, S.H.I.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN & RB 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan

biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1. 2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1. 3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
 - f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
 - g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
 - h) Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - i) Peraturan Menteri PAN & RB 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
-

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

1. 4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.1. Pelaksanaan Pengupulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.1. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Hakim Pengawas Bidang). Yang kemudian akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan SPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/ penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

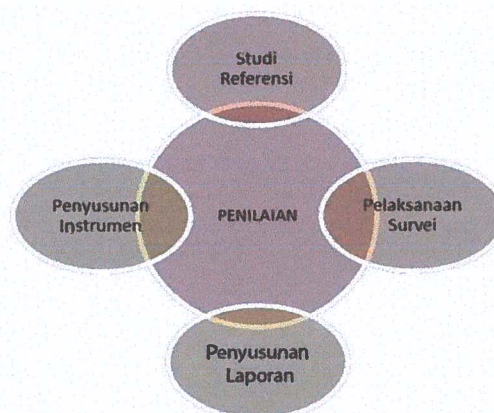
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1
Model alur penyusunan SPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1.	Manipulasi Peraturan
2.	Penyalahgunaan Jabatan
3.	Menjual Pengaruh
4.	Transparansi Biaya
5.	Transaksi Rahasia
6.	Biaya Tambahan
7.	Hadiah
8.	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10.	Perbuatan Curang

Tabel 3
Standar Nilai & Bobot SPAK

https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk/perhitungan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi SPAK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2.	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3.	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1 Profil responden

3.1.1. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang jenis kelamin, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan menunjukkan adanya keseimbangan dari jenis kelamin laki-laki atau jenis perempuan.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	179	66
2	Perempuan	91	34
3	Tidak Mencantumkan Jenis Kelamin	-	-
TOTAL		270	100

3.1.2. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebesar 69%.

Tabel 5.

Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	%
1	SD	1	0%
2	SMP	4	1%
3	SMU	186	69%
4	D1	1	0%
5	D2	0	0%
6	D3	0	0%
7	S-1	77	29%
8	S-2	1	0%
9	S-3	0	0%
JUMLAH		270	100%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 60 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lamongan memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta.

Tabel 6.

Jenis pekerjaan responden

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	%
1	Wirausaha	30	11%
2	PNS	6	2%
3	TNI	0	0%
4	POLRI	1	0%
5	Swasta	162	60%
6	Tenaga Kontrak	9	3%
7	Lainnya	62	23%
JUMLAH		270	100%

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 29 tahun s/d 39 tahun, sebesar 39 % responden.

Tabel 7.

Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	29	11%
2	29-39	105	39%
3	40-49	92	34%
4	50-59	44	16%
5	60-69	0	0%
JUMLAH		270	100%

3.2 Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi data

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA melakukan Manipulasi data.

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi data

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	213	79%
2	Jarang	3	57	21%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	1	0%
JUMLAH			271	100%

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan.

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	244	90%
2	Jarang	3	26	10%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
JUMLAH			270	100%

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Menjual Pengaruh.

Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	248	92%
2	Jarang	3	22	8%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
JUMLAH			270	100%

3.2.4. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator

Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA menjalankan Transaksi Biaya.

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	223	83%
2	Jarang	3	47	17%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
JUMLAH			270	100%

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Biaya Tambahan.

Tabel 12.

Indeks pada indikator tambahan biaya

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	234	87%
2	Jarang	3	36	13%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
JUMLAH			270	100%

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Dalam Indikator Hadiah.

Tabel 13.

Indeks pada indikator hadiah

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	245	91%
2	Jarang	3	25	9%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
JUMLAH			270	100%

3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Biaya yang tertutupi (Transparasi Biaya).

Tabel 14.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran.

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	236	87%
2	Jarang	3	34	13%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
JUMLAH			270	100%

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan TIDAK ADA dari tindakan Percaloan.

Tabel 15.

Indeks pada indikator percaloan

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	247	91%
2	Jarang	3	23	9%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
JUMLAH			270	100%

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Perbuatan Curang.

Tabel 16.

Indeks pada indikator perbuatan curang

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	249	92%
2	Jarang	3	21	8%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
JUMLAH			270	100%

3.2.10. Indikator mengurus lewat pegawai

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA mengurus lewat pegawai.

Tabel 17.

Indeks pada indikator mengurus lewat pegawai

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	257	95%
2	Jarang	3	13	5%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
JUMLAH			270	100%

3.3 Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lamongan sebesar 3,89/97.19%.

Tabel 18.

Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Lamongan

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Peringkat
Q 1	Manipulasi Data	3,79	10
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,90	6
Q 3	Menjual Pengaruh	3,92	3
Q 4	Tranparansi Biaya	3,83	9
Q 5	Transaksi Rahasia	3,87	8

Q 6	Biaya Tambahan	3,91	5
Q 7	Hadiah	3,87	7
Q 8	Transparansi Pembayaran	3,91	4
Q 9	Percaloan	3,92	2
Q 10	Perbuatan Curang	3,95	1
NILAI SPAK		3,89	

Indeks **3,89** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 4.

Tabel 19.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Lamongan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi SPAK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2.	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3.	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4 Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan

Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1.	pelayanan sudah bagus agar ditingkatkan lagi
2.	terima kasih pelayanan sudah bagus, agar ditingkatkan kembali
3.	sudah berjalan dengan baik dan efektif
4.	pelayanan yang ringkas
5.	sudah bagus, agar ditingkatkan kembali kinerjanya

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lamongan diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Lamongan memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,89/97.19%** atau masuk pada kategori Bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Indikator	Nilai
	Manipulasi Peraturan	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,79
	Penyalahgunaan Jabatan	
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	3,90
	Menjual Pengaruh	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	3,92
	Transparansi Biaya	
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?	3,83
	Transaksi Rahasia	
5.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,87
	Biaya Tambahan	
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang	3,91

	diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?	
7.	Hadiah Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)	3,87
8.	Transparansi Pembayaran Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?	3,91
9.	Percaloan Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?	3,92
10.	Perbuatan Curang Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan?	3,95

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lamongan triwulan kedua (April, Mei, Juni) Tahun 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,25** atau masuk pada persepsi *Bersih dari Korupsi*. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan ada tiga Indikator memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya, yaitu Manipulasi Peraturan, Transparansi Biaya, dan Transaksi Rahasia.

4.2. Rekomendasi

Untuk bisa mewujudkan pelayanan cepat dan prima yang terhindar dari perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas serta baik oleh pengambil keputusan (decision maker) dan pimpinan unit pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku.

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Satuan kerja : PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB
 Alamat : JL. VETERAN NO 18 LAMONGAN

Respo nden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
25	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	
26	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
27	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	
32	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
47	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	

48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
54	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
58	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
59	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	
60	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
63	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	
64	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
65	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	
66	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	
67	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
68	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
69	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
70	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
71	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
76	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
78	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	
79	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
80	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	
81	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	
82	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
83	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	
84	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	
85	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	
86	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
87	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
88	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
89	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
90	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
92	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	
93	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	
94	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	
95	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	
96	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
100	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
102	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
103	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
104	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	

Jumlah Responden

1023	1054	1058	1033	1044	1055	1046	1057	1059	1067
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

N.Rata-rata	3,79	3,90	3,92	3,83	3,87	3,91	3,87	3,91	3,92	3,95		
												1 Bob
NRR Tertimbang	0,38	0,39	0,39	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	3,89	10 Unsi
											0,1	Bob
0,05												

4	213	244	248	223	234	245	236	247	249	257
3	57	26	22	47	36	25	34	23	21	13
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan

NRR : Nilai Rata-rata

IPK : Indeks Persepsi Korupsi

*) : Jumlah NRR IPK Tertimbang

NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi

3,89

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Bobot
Q 1	Manipulasi Data	3,79	10
Q 2	Penyalahgunaan Jabat	3,90	6
Q 3	Menjual Pengaruh	3,92	3
Q 4	Transparansi Biaya	3,83	9
Q 5	Transaksi Rahasia	3,87	8
Q 6	Biaya Tambahan	3,91	5
Q 7	Hadiah	3,87	7
Q 8	Transparansi Pembayaran	3,91	4
Q 9	Percaloan	3,92	2
Q 10	Perbuatan Curang	3,95	1
		3,89	

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konv	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,25	25,00-43,75	1	Selalu
1,26-1,75	43,76-62,50	2	Sering
1,76-2,50	62,51-81,25	3	Jarang
2,51-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada